

**Judul** : BP Tapera siapkan infrastruktur operasi  
**Tanggal** : Kamis, 09 Juli 2020  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 22

## BP Tapera Siapkan Infrastruktur Operasi

Akan menggandeng KSEI dan manajer investasi yang memiliki integritas.



TEMPO/HILMAN FATHURRAHMAN W

**Ghoida Rahmah**  
[ghoida.rahmah@tempo.co.id](mailto:ghoida.rahmah@tempo.co.id)

**JAKARTA** - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah bersiap memulai operasi pada awal 2021. Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Nostra Tarigan, mengatakan pemerintah telah memberikan modal awal Rp 2,5 triliun untuk kegiatan operasional. "Modal tersebut kami kelola secara terus-menerus dan hasil pemupukannya untuk menutupi kebutuhan operasional, sehingga kami tidak menggunakan dana peserta," ujar dia, kemarin. Nostra mengatakan pematangan kelengkapan operasional dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 yang memuat rincian syarat dan ketentuan pelaksanaan program Tapera. "Kami sedang menyusun regula-

si teknis dan menyiapkan infrastruktur, terutama untuk sistem informasi," ucapnya. Menurut Nostra, sistem informasi yang mumpuni dibutuhkan untuk menjaga prinsip pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Adapun simpanan dana peserta, kata dia, akan dikelola dan diinvestasikan oleh BP Tapera bekerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, serta manajer investasi yang berpengalaman dan berintegritas. "Kami akan membuat sistem informasi yang memungkinkan peserta dapat mengakses dan memantau langsung simpanan serta hasil pemupukannya setiap saat," kata dia. Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Eko Ariantoro, mengatakan proses lain yang tengah berlangsung saat ini adalah pengalihan dana simpanan milik pega-

wai negeri sipil (PNS) peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Bagi PNS nonaktif atau yang telah pensiun, dana tersebut akan dicairkan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan bagi PNS aktif, dana simpanan secara otomatis akan dialihkan sebagai saldo awal peserta di BP Tapera. Meski pada tahap awal peserta yang diwajibkan mengikuti program ini adalah PNS, tentara dan polisi, serta pekerja perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah, Eko mengatakan pekerja swasta ataupun informal sudah bisa bergabung. "Mereka bisa bergabung setelah kami beroperasi penuh awal tahun depan," ucap dia. Pekerja swasta mulai wajib menjadi peserta paling lambat tujuh tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pengamat properti, Ali Traghanda, berujar, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi menjadi hal krusial mengingat besarnya dana publik yang akan dikelola BP Tapera pada masa depan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah proses penunjukan manajer investasi yang akan mengelola dana Tapera. "Sikap hati-hati sudah harus dimulai sejak awal, karena yang dikelola ini kan uang rakyat. Kalau dalam satu waktu dana yang dikelola negatif atau merugi, siapa yang tanggung jawab?" katanya. "Jangan sampai nanti saling tuding." Kekhawatiran tersebut beralasan, terlebih potensi dana Tapera yang terkumpul setiap tahun dapat mencapai Rp 50 triliun. "Dana dengan kelolaan manajer investasi dapat bertendensi ke arah komersial dan menjadi bancakan pihak-pihak tertentu," ujar Ali.

**Pegawai negeri sipil di Balai Kota, Jakarta, Juni lalu. Deputi Komisioner bidang Pengerahan Dana BP Tapera, Eko Ariantoro, mengatakan proses yang tengah berlangsung saat ini adalah pengalihan dana simpanan milik PNS peserta Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).**

### Berbeda Cara Mengelola

**A**DA tiga hal yang membedakan pengelolaan program tabungan perumahan di bawah BP Tapera dengan Bapertarum PNS. Perbedaan tersebut terkait dengan kepesertaan, besaran iuran simpanan, serta skema pemanfaatan simpanan.

#### Kepesertaan

Bapertarum PNS hanya untuk aparat sipil negara (ASN). BP Tapera menangani ASN, pegawai badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), tentara dan polisi, hingga pekerja swasta.

#### Nilai Iuran Simpanan

Iuran di Bapertarum tak mengalami perubahan sejak 1993, yaitu

- golongan I  
Rp 3.000 per bulan,
- golongan II  
Rp 5.000 per bulan,
- golongan III  
Rp 7.000 per bulan, dan
- golongan IV  
Rp 10.000 per bulan.

#### Iuran BP Tapera dipatok

3 persen dari gaji atau upah. Untuk peserta pekerja, iuran ditanggung oleh pemberi kerja 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen.

#### Skema Pemanfaatan Simpanan

- Bapertarum digunakan untuk pembelian rumah, dengan sistem prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan kepemilikan. Jika tidak digunakan, simpanan yang dimiliki dapat diambil setelah pensiun.
- Simpanan BP Tapera dapat digunakan untuk membeli rumah, membangun rumah, dan memperbaiki rumah. Peserta mendapat manfaat setelah memenuhi jangka waktu tertentu.
- Peserta bisa memperoleh pengembalian simpanan beserta hasil pengembangannya ketika masa kepesertaan berakhir. Kepesertaan berakhir jika pekerja telah memasuki masa pensiun untuk pekerja formal, mencapai usia 58 tahun bagi peserta mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut.

● GHOIDA RAHMAT